

KRITIK TEKS PRASASTI SATRA *Textual Critic of Satra Inscription*

Hedwi Prihatmoko dan Luh Suwita Utami

Balai Arkeologi Bali

Jl. Raya Sesetan No. 80, Denpasar 80223

Email: hedwi.prihatmoko@kemdikbud.go.id; suwita.utami@kemdikbud.go.id

Naskah diterima: 09-03-2018; direvisi: 27-03-2018; disetujui: 19-10-2018

Abstract

Satra Inscription is one of the inscriptions which have never been wholly studied before, so epigraphy study of the inscription become significant. This research aims to evaluate the information contained in Satra Inscription for the purpose of reconstructing cultural history and placing it in historical context. The methods used in this research consist of data collection, analysis, and interpretation. The data were collected through observation and literature study. Analysis was done using textual critic approach, and interpretation was done by explaining the relevance of Satra Inscription in historical context. The research shows that Satra Inscription is a copied inscription (tinulad), and assumed of being inscribed after the middle of the 15th century AD. The inference is based on the inconsistency between the king's name and the year mentioned. Palaeography study, the usage, and language pattern of the inscription are also strengthen the inference that Satra Inscription as copied inscription. Textual critic of the inscription shows that the usage of informations contained in Satra Inscription as historical data needs to be carefully used.

Keywords: inscription, satra, textual critic, tinulad.

Abstrak

Prasasti Satra merupakan salah satu temuan prasasti baru yang belum pernah diteliti secara menyeluruh, sehingga kajian epigrafi terhadap prasasti ini menjadi penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi informasi yang ada di Prasasti Satra untuk kepentingan rekonstruksi sejarah kebudayaan dan menempatkannya di dalam konteks sejarah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, analisis data, dan penafsiran data. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan studi pustaka. Analisis data dilakukan melalui kritik teks, dan penafsiran data dilakukan dengan memaparkan relevansi Prasasti Satra di dalam konteks sejarah. Penelitian ini menunjukkan bahwa Prasasti Satra merupakan prasasti tinulad, yang penulisannya diduga setelah pertengahan abad ke-15 Masehi. Dugaan tersebut muncul berdasarkan adanya ketidaksesuaian antara penyebutan nama raja dengan angka tahun yang tercantum. Tinjauan dari aspek paleografi, penggunaan, dan pola bahasanya juga menguatkan dugaan tersebut. Kritik teks terhadap Prasasti Satra diperlukan agar terdapat kehati-hatian ketika menggunakan informasi yang terkandung di dalam Prasasti Satra sebagai data sejarah.

Kata kunci: prasasti, satra, kritik teks, tinulad.

PENDAHULUAN

Bali merupakan salah satu wilayah di Nusantara yang memiliki banyak tinggalan prasasti, setelah Pulau Jawa. Hingga tahun

2004, jumlah prasasti yang telah ditemukan di Bali sebanyak 244 kelompok prasasti. Kendati demikian, informasi terkait temuan-temuan prasasti baru dari masyarakat masih

tetap ada dan menunjukkan bahwa penelitian epigrafi masih sangat diperlukan di Bali. Tinggalan prasasti paling banyak terdapat di wilayah Kabupaten Bangli, yaitu tidak kurang dari 69 kelompok prasasti tembaga dan 8 kelompok prasasti batu (Suarbhawa 2004a, 66). Sebagian besar prasasti yang terdapat di Kabupaten Bangli ditemukan di wilayah Kecamatan Kintamani, misalnya Prasasti Kintamani, Serai, Sukawana, Campetan, Batur Pura Abang, Trunyan, Manikliu, Lembean, Gunung Penulisan, Dausa, Subaya, Buwahan, dan Satra (Sunarya et al. 2015, 3). Salah satu temuan prasasti yang belum pernah dikaji secara lengkap adalah Prasasti Satra, sehingga Balai Arkeologi Bali melakukan penelitian terhadap prasasti ini. Penelitian yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Bali bukan merupakan penelitian pertama. Sebelumnya, penelitian terhadap Prasasti Satra pernah dilakukan oleh M.M. Sukarto K. Atmodjo. Selain Atmodjo, penelitian epigrafi lain hingga tahun 1975 pernah dilakukan oleh J.L.A. Brandes (1885 dan 1889), P.V. van Stein Callenfels (1926), L. Ch. Damais (1955), R. Goris (1929, 1936, dan 1954), Ktut Ginarsa (1961 dan 1973), dan W.F. Stutterheim (1929 dan 1934), tetapi semuanya belum ada yang mengkaji Prasasti Satra (lihat Atmodjo 1975, 24–26). Pembacaan awal terhadap Prasasti Satra oleh Atmodjo dilakukan pada tanggal 27 Desember 1975, tetapi hasil pembacaan tersebut baru disampaikan dalam kegiatan Analisis Hasil Penelitian Arkeologi yang diadakan di Trowulan pada tahun 1991, dan baru diterbitkan dalam bentuk *proceedings* pada tahun 1995. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Atmodjo tidak lengkap karena hanya mengulas dua lempeng saja, yaitu lempeng Ib (hanya satu sisi yang bertuliskan, terdiri dari enam baris) dan lempeng IIa (hanya dibaca empat dari enam baris di salah satu sisinya dari dua sisi yang bertulisan). Padahal secara keseluruhan, Prasasti Satra terdiri dari sembilan lempeng. Penelitian yang dilakukan Atmodjo tersebut hanya memuat alih aksara saja, tanpa disertai dengan alih bahasa, tetapi

dilengkapi dengan pembahasan singkat tentang isi prasasti (lihat Atmodjo 1995). Penelitian Atmodjo terhadap Prasasti Satra merupakan penelitian yang pertama, sehingga belum terdaftar dalam inventaris prasasti di buku *Prasasti Bali* karangan Roelof Goris (Goris 1954). Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh masyarakat *penyungsurung* Pura Bale Agung di Desa Satra, setelah penelitian Atmodjo, penelitian terhadap Prasasti Satra pernah dilakukan juga oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (sekarang menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali) dan Museum Bali, tetapi laporan hasil penelitiannya tidak pernah diterbitkan.

Prasasti merupakan salah satu data utama dalam penyusunan sejarah kuno Indonesia, khususnya sejarah masa klasik. Prasasti merupakan basis utama, terutama dalam penyusunan kronologi, dalam historiografi masa klasik. Namun, temuan prasasti yang ditemukan sering dalam kondisi yang tidak lengkap, bahkan rusak. Hal ini menyebabkan data sejarah yang mampu diungkap melalui prasasti juga terbatas. Oleh karena itu, meskipun prasasti merupakan data utama dalam penelitian epigrafi, penelitian epigrafi secara luas meliputi juga kajian terhadap teks-teks lain, mengingat begitu terbatasnya data yang terkandung di dalam prasasti. Teks-teks lain yang menjadi ruang lingkup kajian epigrafi dapat meliputi karya sastra dan berita asing, baik lokal maupun asing, serta benda-benda lain yang mengandung tulisan yang dipahatkan melalui berbagai jenis media (seperti mata uang, senjata, dan alat-alat perlengkapan) (Damais 1975, 24–25; Kartakusuma 2003, 200, 208). Teks-teks lain ini merupakan data pelengkap, sekaligus pembanding, yang bertujuan untuk melengkapi dan mengklarifikasi informasi-informasi yang terkandung di dalam prasasti. Melihat pentingnya prasasti dalam suatu penyusunan historiografi, penelitian terhadap Prasasti Satra merupakan upaya yang penting dalam melengkapi sejarah kuno Indonesia, khususnya Bali. Berdasarkan uraian tersebut,

permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana kritik teks terhadap Prasasti Satra dan relevansinya di dalam konteks sejarah.

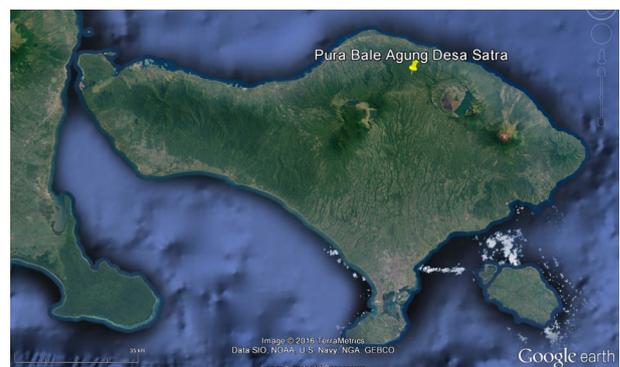
Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, penelitian epigrafi akan bermuara pada penyusunan historiografi. Secara umum, ilmu arkeologi bertujuan untuk: 1) merekonstruksi sejarah kebudayaan dari tinggalan budayanya, 2) merekonstruksi perilaku masyarakat pendukung dari suatu tinggalan arkeologi, 3) menjelaskan proses budaya untuk mengetahui bagaimana dan mengapa suatu kebudayaan berubah sejalan dengan waktu, dan 4) untuk menggunakan "rekaman" arkeologi tersebut untuk memahami makna kebudayaan di masa lalu dan relevansinya terhadap masa kini (Renfrew dan Bahn 2016, 17; Ashmore dan Sharer 2010, 23). Uraian tujuan arkeologi tersebut memperlihatkan adanya keterkaitan antara tujuan arkeologi dengan muara penelitian epigrafi, yaitu merekonstruksi sejarah kebudayaan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi informasi yang terkandung di dalam Prasasti Satra untuk kepentingan rekonstruksi sejarah kebudayaan dan menempatkan data yang terkandung di dalam Prasasti Satra di dalam konteks sejarah atau historiografi.

Prasasti biasanya berupa putusan resmi yang dikeluarkan oleh raja atau pejabat tinggi kerajaan yang dirumuskan berdasarkan kaidah-kaidah tertentu. Oleh karena bersifat resmi, prasasti seringkali dianggap sebagai salah satu sumber tertulis yang memiliki tingkat keabsahan tinggi dibandingkan dengan tinggalan tertulis masa lalu lainnya (Boechari 2012, 4; Djafar 1991, 177). Kendati memiliki tingkat validitas yang tinggi, semua informasi yang terkandung di dalam prasasti bukan berarti dapat dipakai secara "mentah" tanpa melalui kritik teks terlebih dahulu. Prasasti-prasasti yang ada di Indonesia ada yang memang ditulis pada zamannya, tetapi ada juga yang berupa prasasti salinan (*tinulad*) yang ditulis pada masa kemudian, tetapi menceritakan suatu peristiwa dari masa-masa sebelumnya

(lihat Damais 1975, 25), sehingga kritik teks memiliki peran penting dalam menempatkan prasasti sebagai data sejarah. Proses kritik teks bertujuan memberikan nilai terhadap teks dan menempatkannya pada tempatnya yang tepat. Kritik teks merupakan upaya mengevaluasi dan menguji sumber tertulis, dalam hal ini prasasti, sehingga data atau fakta sejarah yang dipakai dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Evaluasi dan pengujian terhadap teks ini tidak hanya terbatas pada ruang lingkup teks itu sendiri, tetapi juga melalui aspek-aspek di luar teks itu, misalnya melalui perbandingan dengan teks-teks lain (tinjauan intertekstual). Pengujian ini bertujuan untuk menghindari adanya anakronisme dalam penggunaan data prasasti. Salah satu bentuk evaluasi dan pengujian ini dilakukan dengan meninjau beberapa unsur yang terkandung di dalam teks, misalnya unsur waktu, tempat, tokoh, dan peristiwa (Soesanti 1997, 178–81; Kartakusuma 2003, 203).

METODE

Penelitian terhadap Prasasti Satra yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Bali dilaksanakan pada 28-30 November 2014. Hasil penelitian ini pernah dipaparkan oleh Hedwi Prihatmoko dan Luh Suwita Utami dalam *Seminar Nasional: Penelitian Terkini Prasasti Indonesia* pada tanggal 6-7 Maret 2018 yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Saat ini, Prasasti Satra disimpan di Pura Bale Agung, Desa Satra, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli (gambar 1).



Gambar 1. Lokasi Penyimpanan Prasasti Satra di Pura Bale Agung, Desa Satra.
(Sumber: Diolah dari Google Earth)

Secara umum, metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, analisis data, dan penafsiran data. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan studi pustaka. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi prasasti berdasarkan unsur-unsurnya. Unsur-unsur yang diidentifikasi meliputi: unsur fisik, bahan, jumlah lempeng, jumlah baris tiap lempeng, jenis aksara, dan jenis bahasa. Observasi ini dilakukan pada saat kegiatan pembacaan prasasti. Studi pustaka dilakukan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian Prasasti Satra. Tahap analisis data dilakukan melalui pendekatan kritik teks, yaitu meliputi kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern bertujuan untuk menguji autentisitas teks prasasti, yang dalam penelitian ini melalui tinjauan unsur penanggalan dan paleografi. Kritik intern bertujuan untuk menguji isi atau substansi dari teks itu sendiri, yang dalam penelitian ini melalui tinjauan penggunaan bahasa dan polanya (Soesanti 1997, 178–79). Dalam kritik teks Prasasti Satra, penelitian ini juga menggunakan perbandingan dengan teks-teks lain, baik prasasti maupun naskah. Tahap penafsiran data dilakukan dengan memaparkan relevansi Prasasti Satra di dalam konteks sejarah berdasarkan hasil kritik teks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prasasti Satra terbuat dari tembaga, seluruhnya berjumlah sembilan lempeng, yaitu terdiri dari dua lempeng besar berukuran rata-rata panjang 42 cm dan lebar 8,5 cm, serta tujuh lempeng kecil berukuran rata-rata panjang 36 cm dan lebar 6,5 cm. Kesembilan lempeng ini ditulis dengan menggunakan aksara Kawi dan bahasa Jawa Kuno. Prasasti Satra dibagi ke dalam tiga kelompok, meliputi: (1) kelompok I adalah lempeng yang terdiri dari enam baris, (2) kelompok II adalah lempeng yang terdiri dari empat baris dan memiliki nomor, dan (3) kelompok III adalah lempeng yang terdiri dari empat baris dan tidak memiliki nomor (gambar 2).



Gambar 2. Sembilan Lempeng Prasasti Satra.
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Bali)

Kelompok I berjumlah dua lempeng dan memiliki nomor 1 dan 2. Lempeng nomor 1 hanya ditatah pada satu sisi, sedangkan lempeng nomor 2 ditatah pada kedua sisinya. Kelompok II berjumlah tiga lempeng dan memiliki nomor 3, 4, dan 5, serta ditatah pada kedua sisinya. Kelompok III berjumlah empat lempeng yang ditatah pada kedua sisinya dan tidak memiliki nomor prasasti. Penelitian yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Bali pada tahun 2014 ini mencakup alih aksara dari aksara Kawi ke huruf latin, alih bahasa dari bahasa Jawa

Kuno ke bahasa Indonesia, dan ulasan singkat terhadap keseluruhan isi prasasti (Suarbhawa et al. 2016).

Ringkasan Isi Prasasti

Uraian umum dari masing-masing kelompok prasasti adalah sebagai berikut. Prasasti kelompok I menyebutkan nama Śri Maharaja Śri Jayasakti dan berangka tahun 1246 Śaka yang isinya berkenaan dengan permintaan masyarakat Desa Satra agar mendapatkan keringanan terhadap beberapa kewajiban karena telah bertanggung jawab terhadap pemeliharaan bangunan suci Kusumadanta. Terkait dengan pemeliharaan tersebut, tanah di sekitar bangunan suci ditetapkan sebagai jataka (semacam *laba pura*). Prasasti kelompok I juga berisi tentang kewajiban masyarakat Desa Satra agar memperhatikan atau memelihara bangunan suci dengan sebaik-baiknya. Selain aturan mengenai penetapan beberapa kewajiban, terdapat juga aturan pembebasan beberapa jenis pajak atau iuran bagi masyarakat Desa Satra. Kemudian, diatur juga larangan terhadap tindakan kriminal dan tidak terpuji, seperti mencuri, membegal, menghalang, merampas, dan lain-lain. Terdapat juga aturan mengenai pembagian warisan, yaitu jika ada suami atau istri yang meninggal yang dibagi dengan sistem suhunan tanggungan, serta pengaturan nominalnya antara suami, istri, dan bangunan suci, serta untuk keperluan upacara kematiannya.

Prasasti kelompok II isinya berkenaan dengan himbauan agar masyarakat Desa Jikēn Satra melakukan *caru prāyaścitta* (sejenis upacara penyucian) jika terdapat kejadian buruk. Kemudian, diatur juga mengenai perlindungan terhadap orang yang berhutang. Mereka yang berhutang tidak boleh dipaksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi, tetapi tetap diwajibkan untuk membayar pokok hutangnya. Selain itu, terdapat juga keringanan kewajiban, seperti berjaga-jaga apabila di Desa Jikēn Satra berdiam kelompok bangsawan, tetapi masyarakat tetap harus membayar beberapa

jenis iuran. Diatur juga mengenai peraturan jika warga Desa Jikēn Satra memperistri keturunan brahmana, *huñjēman*, dan *juru kling*, mereka harus membayar sejumlah denda. Warga Desa Jikēn Satra diperkenankan juga membuat saluran air dari sumber mata air di manapun dan untuk keperluan tersebut, mereka diperbolehkan untuk menebang kayu larangan, seperti kemiri, beringin, *mēndhēp*, jarak, kapulaga, dan kemukus.

Prasasti kelompok III berbicara tentang batas-batas Desa Jikēn Satra, dan penetapan batas desa ini agar jangan diganggu gugat dan harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Isi prasasti ini kemudian diperkuat dengan seruan kutukan (*sapatha*) yang akan menimpa siapa saja yang melanggarnya. Kutukan ini dimohonkan kepada para dewa-dewa, kekuatan alam, dan *bhuta*. Prasasti kelompok III ini juga berisi himbauan agar masyarakat tanggap terhadap peristiwa yang terjadi di sekitar mereka, seperti hewan ternak atau manusia yang mati tenggelam di sungai, atau peristiwa *salah pati*. Apabila masyarakat Desa Jikēn Satra mengetahui hal tersebut, mereka harus melaporkannya kepada pejabat yang terkait (Suarbhawa et al. 2016, 24–25).

Kritik Teks Prasasti Satra

Kritik ekstern terhadap Prasasti Satra ditinjau dari unsur penanggalan dan paleografi. Berdasarkan unsur penanggalannya, terdapat ketidakcocokan dalam penulisan angka tahun dengan nama raja yang disebutkan di dalam prasasti tersebut, yaitu pada Prasasti Satra kelompok I lempeng 1b yang menyebutkan nama Śri Maharaja Śri Jayasakti, tetapi berangka tahun 1246 Śaka atau 1324 Masehi. Berdasarkan masa pemerintahannya, Raja Jayasakti memerintah pada tahun 1055-1072 Śaka/1133-1150 Masehi. Sementara itu, tahun 1246 Śaka termasuk ke dalam masa pemerintahan Bhaṭṭāra Śrī Mahāguru (1246-1247 Śaka/1324-1325 Masehi) (Astra 1997, 403–4).

Aspek paleografi ditinjau berdasarkan kajian yang pernah dilakukan oleh J.G. de Casparis dan I Gde Semadi Astra. De Casparis (1975) secara umum membagi perkembangan paleografi masa klasik Hindu-Buddha di Indonesia ke dalam 5 bagian, yaitu: (1) aksara sebelum pertengahan abad ke-8 Masehi, meliputi: a) aksara Pallawa Awal dan b) aksara Pallawa Akhir; (2) aksara Kawi Awal (sekitar 750-925 Masehi), meliputi: a) fase arkaik dan b) bentuk standar Kawi Awal; (3) aksara Kawi Akhir (sekitar 925-1250 Masehi); (4) aksara-aksara Jawa dan daerah lain dari periode Majapahit (1250-1450 Masehi); dan (5) aksara-aksara dari pertengahan abad ke-15 Masehi dan aksara-aksara asing.

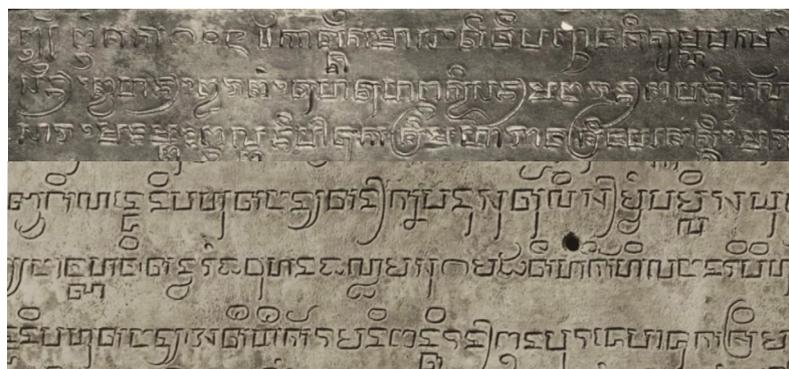
Berdasarkan pembagian tersebut, sebagian besar prasasti yang diterbitkan di Bali termasuk ke dalam kategori aksara Kawi Akhir. Aksara Kawi Akhir telah menunjukkan perkembangan stilistik yang cukup jelas jika dibandingkan dengan masa sebelumnya, sehingga de Casparis menyatakan: *“this Kawi, later style, as typically East Javanese”* (de Casparis 1975, 38). Kendati demikian, jenis aksara Kawi Akhir berkembang juga di wilayah lain selain Jawa Timur, seperti di Bali, Sunda, dan Sumatra (de Casparis 1975, 42).

Lebih khusus, I Gde Semadi Astra (dalam Wiguna 2011, 17–18) membagi lagi aksara kawi yang berkembang di Bali ke dalam enam tipe, yaitu: (1) tipe aksara Bali kuno tertua; (2) tipe aksara tegak dan agak persegi; (3) tipe aksara dengan bentuk halus, rapi, dan ditatah

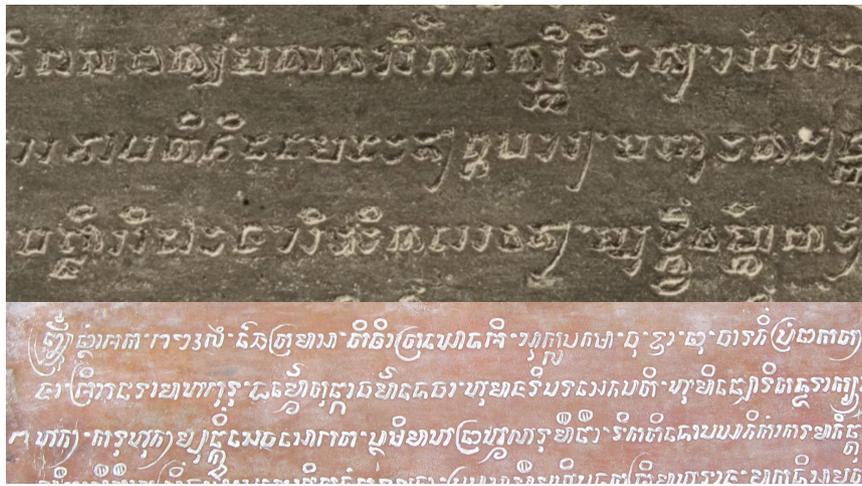
agak miring; (4) tipe aksara dengan bentuk sempurna, agak persegi, dipahatkan halus, agak miring, rapi dan indah/ornamentalis, berkembang sekitar pertengahan abad ke-12 sampai sekitar pertengahan abad ke-13 Masehi; (5) tipe aksara dengan bentuk dasar persegi agak kasar dan agak besar jika dibandingkan dengan aksara prasasti lainnya, berkembang sekitar akhir abad ke-13 sampai 14 Masehi; (6) tipe aksara yang mirip dengan aksara periode Majapahit.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sebagian besar aksara prasasti Bali Kuno termasuk ke dalam kategori aksara Kawi Akhir. Berdasarkan pengelompokan Astra, aksara tipe 1, 2, 3, dan 4 dapat digolongkan sebagai tipe aksara Kawi Akhir. Terdapat juga prasasti-prasasti Bali Kuno yang aksaranya dapat dikategorikan ke dalam tipe aksara dari periode Majapahit. Dalam pengelompokan Astra, tipe aksara ini termasuk ke dalam tipe 5 dan 6, yang dalam rentang periode ini memberikan kesan bahwa berbagai wilayah cenderung mengembangkan variasi aksaranya sendiri (de Casparis 1975, 47), termasuk wilayah Bali.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat anakronisme dalam Prasasti Satra berupa ketidakcocokan antara nama raja yang disebutkan dengan angka tahunnya, yaitu penyebutan Śri Maharaja Śri Jayaśakti dengan angka tahun 1246 Śaka yang seharusnya menjadi periode pemerintahan Bhaṭṭara Śrī Mahāguru. Oleh karena itu, tinjauan paleografi dilakukan terhadap periode pemerintahan kedua



Gambar 3. Prasasti dari masa Raja Jayaśakti, yaitu Prasasti Buwahan C (atas) dan Sading B (bawah). (Sumber: Dokumen Oudheidkundige Dienst Koleksi Universitas Leiden)



Gambar 4. Prasasti dari masa Bhaṭāra Śrī Mahāguru, yaitu Prasasti Cempaga C (atas) dan Tumbu (bawah).
(Sumber: Dokumen Oudheidkundige Dienst Koleksi Universitas Leiden dan Balai Arkeologi Bali)

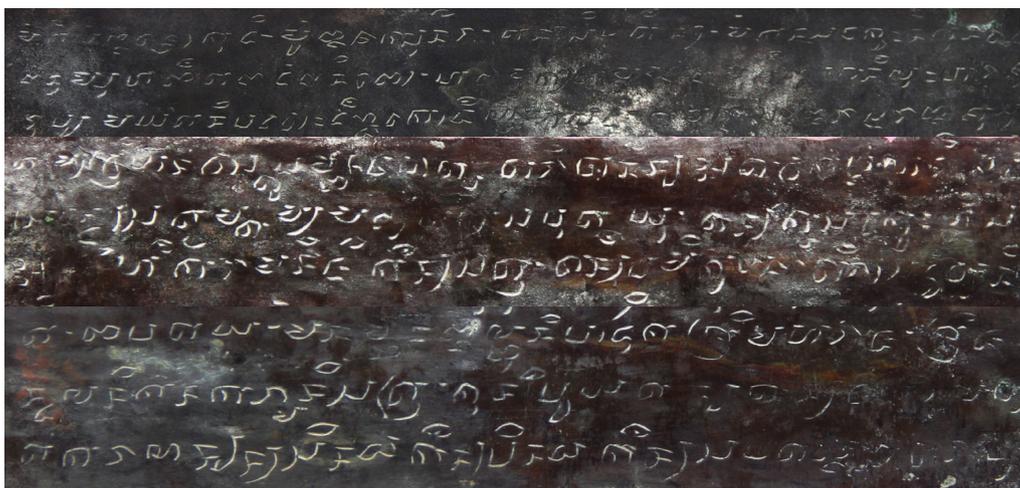
raja tersebut. Contoh prasasti yang menjadi perbandingan dari masa Raja Jayasakti adalah Prasasti Buwahan C (1068 Śaka) dan Sading B (1072 Śaka) (gambar 3), sedangkan dari masa Bhaṭāra Śrī Mahāguru adalah Prasasti Cempaga C (1246 Śaka) dan Tumbu (1247 Śaka) (gambar 4).

Secara paleografi, Prasasti Buwahan C dan Sading B dari masa Raja Jayasakti termasuk ke dalam tipe aksara Kawi Akhir. Adapun, Prasasti Cempaga C dan Tumbu dari masa Bhaṭāra Śrī Mahāguru dapat dikategorikan ke dalam tipe aksara periode Majapahit. Meskipun memiliki tipe yang berbeda, penulisan aksara di keempat prasasti tersebut terlihat rapi dan konsisten, dengan tatahan aksara yang cukup

dalam sehingga aksaranya terlihat jelas. Hal yang berbeda tampak dalam gaya dan cara penulisan dalam Prasasti Satra (gambar 5).

Secara umum, gaya penulisan aksara Prasasti Satra tidak rapi dan tidak konsisten, dengan tatahan aksara yang tidak dalam. Hal ini menyebabkan aksaranya menjadi mudah aus dan tipis sehingga menyulitkan pembacaan. Berdasarkan gaya dan cara penulisannya, Prasasti Satra diduga tidak ditulis pada masa pemerintahan Raja Jayasakti dan Bhaṭāra Śrī Mahāguru.

Kritik intern terhadap Prasasti Satra ditinjau dari penggunaan bahasa dan polanya. Penulisan bahasa dalam Prasasti Satra banyak terdapat kesalahan penulisan istilah atau kata.



Gambar 5. Gaya aksara Prasasti Satra dari kelompok I (atas), II (tengah), dan III (bawah).
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Bali)

Atmodjo (1995, 104) mencatatkan beberapa kesalahan penulisan tersebut, di antaranya adalah: *prayacita* (seharusnya *prāyaścitta*), *dwiya* (*dwiṭīya*), *puleka* (*palekha*), *patika tanah* (*patikēl tanah*), *yan tupur* (*yan tumpur*), *prinantika* (*prāṇāntika*), *tanpa wridan* (*tanpahudan*), *dunakēn i macan* (*dmakēn i macan*). Sementara itu, kesalahan yang ditemukan dari pembacaan yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Bali sendiri, di antaranya adalah: *mayañ tanipa woḥ* (seharusnya *mayañ tanpa wwah*), *dēndha kodēndha* (*dēṇḍa kodēṇḍa*), *ha krañan pjah* (*hana krañan pjah*), *sakweḥni kdhit* (*sakweḥ kēḍik*), *yan nisri* (*yan istri/strī*), *tamwri* (*tan wruh*), *mnhura* dan *manahuru* (*manahura*), *dandi* (*dēṇḍa*), *madi* (*makādi*), *mañhakē caru prayacita* (*mañhanākēn caru prāyaścitta*), *sgat* (*samgat*), *mañutanjñā* (*mañuratang ājñā*). Selain itu, banyak juga penulisan yang tidak konsisten, misalnya: *pējah* dan *pjah*, *dēndha* dan *dandi*.

Unsur lain yang ditinjau dari teks Prasasti Satra difokuskan juga pada unsur tokoh, khususnya terhadap penyebutan nama-nama pejabat, terutama yang terdapat di

dalam kelompok *pakirakirān i jro makabehan*. Tinjauan terhadap para pejabat dalam suatu teks prasasti sering digunakan untuk menempatkan prasasti di dalam konteks sejarah, terutama jika prasasti tersebut tidak mencantumkan nama raja dan angka tahun (Damais 1975, 33). Cara demikian dilakukan juga oleh Goris dalam menyusun kronologi prasasti di dalam buku *Prasasti Bali* (Goris 1954). Penyebutan *pakirakirān i jro makabehan* dalam prasasti Bali kuno mulai muncul sejak abad ke-11 Masehi, yaitu pada Prasasti Batur Pura Abang A yang dikeluarkan Raja Udayana pada tahun 933 Śaka (1011 Masehi) (Astra 2002, 131; Goris 1954, 88–94).

Tinjauan terhadap para pejabat dalam Prasasti Satra dilakukan melalui perbandingan dengan prasasti-prasasti dari masa pemerintahan Raja Jayaśakti dan Bhaṭāra Śrī Mahāguru. Selain Prasasti Satra, setidaknya terdapat 17 prasasti yang dikeluarkan selama masa pemerintahan Raja Jayaśakti dan 3 prasasti dari masa pemerintahan Bhaṭāra Śrī Mahāguru (Goris 1954; Poeger 1964; Atmodjo 1970; 1972; 1977; Suarbhawa 2004b), lihat tabel 1.

Tabel 1. Prasasti-prasasti yang diterbitkan pada masa Raja Jayaśakti dan Bhaṭāra Śrī Mahāguru.

No.	Prasasti Raja Jayaśakti	Tahun (Śaka)	Prasasti Bhaṭāra Śrī Mahāguru	Tahun (Śaka)
1.	Manikliu D=Lambean A	1055	Srokadan B	1246
2.	Manikliu E	---	Cempaga C	1246
3.	Bebandem	---	Tumbu	1247
4.	Landih=Nongan A	---		
5.	Buwahan C	1068		
6.	Langkan	1068		
7.	Depaa	---		
8.	Prasi A	1070		
9.	Campetan	1071		
10.	Sading B	1072		
11.	Tampakgangsul	---		
12.	Dausa BII	---		
13.	Pemecutan B	---		
14.	Sibang Kaja	---		
15.	Kapal	---		
16.	Asahduren	---		
17.	Dayankayu	---		

(Sumber: diolah dari Goris 1954; Poeger 1964; Atmodjo 1970; 1972; 1977; Suarbhawa 2004b)

Tidak semua prasasti yang terdapat dalam tabel 1 digunakan sebagai perbandingan. Hanya prasasti-prasasti yang menyebutkan para pejabat dalam kelompok *pakirakirān i jro makabehan* saja yang dipakai sebagai perbandingan. Hanya 10 prasasti dari masa Raja Jayaśakti menyebutkan para pejabat kelompok *pakirakirān i jro makabehan*, sedangkan dari masa Bhaṭāra Śrī Mahāguru hanya ada 2 prasasti saja. Kesepuluh prasasti dari Raja Jayaśakti itu adalah Prasasti Manikliu E, Bebandem, Landih=Nongan A, Buwahan C, Depaa, Prasi A, Campetan, Sading B, Tampakgangsul, dan Dausa BII. Adapun, kedua prasasti dari Bhaṭāra Śrī Mahāguru adalah Prasasti Cempaga C dan Tumbu.

Dalam Prasasti Satra, kelompok pejabat *pakirakirān i jro makabehan* terdapat di dalam prasasti kelompok III yang tidak bernomor, dengan kutipan: "...*tlasinakyakēn i taṇḍa rakyān ri pakirankiran i jro makabehan madi para senapati karuhun mpuku sewasogata sira ana kala maṅkana saṅ senapati sarbwa pu wurigaraga, saṅ seṅapati daṅḍa pu adonamnaṅ saṅ senapati wṛsantēn pu sadugasaha,*

saṅ senapati maṅirinin pu aṅuwiani sgat karaṅapu atajanāta samgat maṅutaṅjña i wu madatambrireh samgat maṅumbul tulabu (puṅku) ḍarmadyakṣa bhataṛa kusumadanta mpuṅkwi kanyabawana daṅacaryya dawāṅsa mpuṅkwi makarun daṅacaryya sawida sireṅ kasogatan pu suda saṅ maha daṅupadyaya saṅ ṅuṣa mpuṅkwi kutrihaṅar daṅupadyaya hajitābhawa...". Berdasarkan kutipan tersebut, kelompok pejabat *pakirakirān i jro makabehan* dalam Prasasti Satra terdiri dari (1) *senapati*, (2) *samgat*, dan (3) kelompok pemuka agama (tabel 2).

Jenis jabatan *senāpati* di Prasasti Satra, yaitu *senapati sarbwa*, *seṅapati daṅḍa*, *senapati wṛsantēn*, dan *senapati maṅirinin*, ditemui juga dalam prasasti Jayaśakti lainnya, tetapi nama pejabat *senāpati*, seperti Pu Adonamnaṅ, Pu Sadugasaha, dan Pu Aṅuwiani tidak muncul di dalam prasasti Jayaśakti yang lain. Hanya nama "Pu Wurigaraga" saja yang penyebutannya mirip dengan penyebutan di Prasasti Prasi A, Campetan, dan Sading B, yaitu "Pu Curigaraga" dan "Mpu Wurikarāga" (Poeger 1964, 20, 103, 109). Hanya saja, nama "Pu Curigaraga/Mpu

Tabel 2. Jenis Jabatan dan Nama Pejabat yang terdapat di Prasasti Satra.

No.	Jenis Jabatan	Gelar (Khusus Pemuka Agama)	Nama Pejabat
<i>Kelompok Senapati</i>			
1.	<i>senapati sarbwa</i>		pu wurigaraga
2.	<i>seṅapati daṅḍa</i>		pu adonamnaṅ
3.	<i>senapati wṛsantēn</i>		pu sadugasaha
4.	<i>senapati maṅirinin</i>		pu aṅuwiani
<i>Kelompok Samgat</i>			
5.	<i>sgat karaṅa pu</i>		atajanāta
6.	<i>samgat maṅutaṅjña i wu</i>		madatambrireh
7.	<i>samgat maṅumbul</i>		tulabu
<i>Kelompok Pemuka Agama</i>			
8.	(puṅku) ḍarmadyakṣa bhataṛa kusumadanta		
9.	mpuṅkwi kanyabawana	daṅacaryya	dawāṅsa
10.	mpuṅkwi makarun	daṅacaryya	sawida
11.			pu suda
12.		saṅ maha daṅupadyaya	saṅ ṅuṣa
13	mpuṅkwi kutrihaṅar	daṅupadyaya	hajitābhawa

(Sumber: Dokumen pribadi)

Wurikarāga” yang terdapat dalam Prasasti Prasi A, Campetan, dan Sading B menjabat sebagai *rakryān juru hinten* atau *senāpati kuturan*. Pada masa kemudian, yaitu pada masa pemerintahan Raja Ragajaya (1077 Śaka/1155 Masehi), nama “Pu Curigaraga” muncul kembali dan menjabat sebagai *senāpati sarbwa*. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah pada masa pemerintahan Raja Ragajaya, muncul nama “Pu Angdonamng” yang menjabat sebagai *senāpati kuturan* (Ginarsa 1968, 26), mirip dengan nama “Pu Adonamng” yang menjabat sebagai *senapati daṇḍa* di Prasasti Satra. Raja Ragajaya hanya mengeluarkan satu prasasti saja, yaitu Prasasti Tejakula (1077 Śaka/1155 Masehi), dan masa pemerintahannya terletak di antara masa pemerintahan Jayaśakti (1055-1072 Śaka/1133-1150 Masehi) dan Jayapangus (1099-1103 Śaka/1178-1181 Masehi) (Astra 1997, 403).

Kelompok jabatan *senapati* di Prasasti Satra muncul juga di prasasti-prasasti masa pemerintahan Bhaṭāra Śrī Mahāguru, tetapi terdapat perbedaan pola penyebutan nama pejabatnya. Dalam prasasti yang dikeluarkan Bhaṭāra Śrī Mahāguru, terdapat penggunaan istilah “*makākasir/hakasirkasir*” sebelum penyebutan nama pejabatnya, seperti dalam kutipan di Prasasti Cempaga C: “... *sang senāpati balabakṣa makākasir gagak sminingrat, sang senāpati daṇḍa makākasir kunda langkatlangkatan, sang senāpa ṅaringin makākasir lembu latēng...*” (Callenfels 1926, 52) dan kutipan Prasasti Tumbu: “... *sang senapati daṇḍa, hakasirkasir kuda langkatlangkatan, sang senapati dinganga haksirkasir tipas, sang senapati maṅiringin hakasirkasir lembu latēng...*” (Sunarya 2014, 38). Selain itu, beberapa nama pejabat *senapati* pada masa Bhaṭāra Śrī Mahāguru juga mengandung unsur nama binatang, seperti Gagaksminingrat, Kudalangkatlangkatan, Lēmbulatēng, dan Mindamacan.

Pada kelompok jabatan *samgat*, sebagian besar penyebutan jenis jabatan *samgat* di Prasasti Satra tidak lazim atau terdapat

kesalahan, kecuali untuk penyebutan *samgat maṅumbul*. Pada masa pemerintahan Jayaśakti, tidak terdapat penyebutan *samgat karaṇapu*, tetapi disebutkan lebih lengkap, yaitu *samgat cakṣu karaṇapura*. Kemudian, jabatan *samgat maṅutanjña i wu* diperkirakan merujuk pada jabatan *samgat maṅuratang ājñā i wuntat*. Dalam prasasti masa Jayaśakti, nama-nama jabatan ini tidak pernah disingkat penulisannya. Jika dibandingkan dengan Prasasti Cempaga C dan Tumbu yang dikeluarkan Bhaṭāra Śrī Mahāguru, pola penyebutan jabatan *samgat*-nya pun berbeda dengan yang ada di Prasasti Satra. Dalam Prasasti Cempaga C, penyebutan *samgat* menghilang dari jabatan *samgat maṅuratang ājñā*, menjadi *maṅuratang ājñā i wulu/hulu*, *maṅuratang ājñā i tngah*, dan *maṅuratang ājñā i wuntat*. Penyebutan *samgat* muncul kembali dalam Prasasti Tumbu, hanya saja penyebutannya agak berbeda, yaitu “*samgēt*”.

Pada masa pemerintahan Bhaṭāra Śrī Mahāguru ini, pejabat yang menduduki posisi (*samgēt*) *maṅuratang ājñā* juga memiliki gelar sebelum penyebutan namanya, yaitu (*sang amawasta*) *mantri sirah* untuk (*samgēt*) *maṅuratang ājñā i hulu*, (*sang amawasta mantri*) *maddhya* untuk (*samgēt*) *maṅuratang ājñā i tngah*, dan (*sang a-*)*pañji* untuk (*samgēt*) *maṅuratang ājñā i wuntat*. Sementara itu, Prasasti Tumbu menyebutkan adanya jabatan *samgēt cakṣu karaṇa* (Callenfels 1926; Sunarya 2014). Terdapat kemungkinan bahwa jabatan tersebut merupakan peleburan dari jabatan *samgat cakṣu karaṇapura* atau *samgat cakṣu karaṇakrānta*.

Dalam Prasasti Satra, nama-nama pejabat yang memegang jabatan *samgat* adalah Atajanāta, Madatambrireh, dan Tulabu. Dari ketiga nama pejabat itu, hanya nama “Madatambrireh” saja yang pernah muncul pada prasasti lain, yaitu Prasasti Tampakgangsul yang menyebutkan nama “Madatambrireh” yang menjabat sebagai *samgat manurātangājñā i wuntat* (Poeger 1964, 110). Sayangnya, Prasasti Tampakgangsul tidak menyebutkan nama raja, angka tahun, atau nama daerah,

dan hanya berisi daftar pejabat saja. Goris (1954, 31; 1965, 36) berasumsi bahwa Prasasti Tampakgangsul mungkin berasal dari masa pemerintahan Jayaśakti atau setidaknya dari masa sebelum pemerintahan Jayapangus. Pendapat Goris tersebut dikemukakan sebelum Ktut Ginarsa menerbitkan Prasasti Tejakula pada tahun 1968 dan merupakan satu-satunya prasasti yang berasal dari pemerintahan Raja Ragajaya. Pemerintahan Raja Ragajaya berlangsung di antara masa pemerintahan Jayaśakti dan Jayapangus. Hal ini memunculkan asumsi bahwa pendapat Goris tersebut belum mempertimbangkan isi Prasasti Tejakula sehingga kemungkinan bahwa Prasasti Tampakgangsul berasal dari masa pemerintahan Ragajaya tidak disampaikan oleh Goris. Kemungkinan ini muncul karena daftar jenis jabatan dan nama pejabat dalam Prasasti Tampakgangsul memiliki beberapa kemiripan dengan Prasasti Tejakula. Namun jika dibandingkan dengan Prasasti Sading B yang dikeluarkan oleh Jayaśakti, terdapat juga beberapa kemiripan jenis jabatan dan nama pejabatnya, sehingga pendapat Goris pun masih dapat dibenarkan (lihat Ginarsa 1968; Poeger 1964; Goris 1954; Goris 1965). Oleh karena itu, keterkaitan nama “Madatambrireh” atau “Madatamwruhhireh” dengan masa Jayaśakti masih belum bisa dipastikan karena selain Prasasti Tampakgangsul dan Satra, nama ini tidak pernah muncul di dalam prasasti Jayaśakti lainnya. Di sisi lain, masa dikeluarkannya Prasasti Tampakgangsul masih belum bisa dipastikan, apakah dikeluarkan oleh Raja Jayaśakti atau Ragajaya. Pada masa pemerintahan Jayapangus, nama tersebut justru lebih sering muncul, seperti pada Prasasti Buwahan E, Penida Kaja, Sembiran C, Kediri, Buwahan D, Sukawana B, Selat A, Pengotan CII, Batunya B, Landih B, Campaga A, Serai B, Tengkulak E, dan Tonja-Pemecutan A, yang semuanya dikeluarkan pada tahun 1103 Śaka. Namun, nama “Madatambringreh” atau “Madatamwringreh” yang muncul pada masa Jayapangus, semuanya menjabat sebagai

samgat mañuratang ājñā i hulu (Astra 1997, 396). Sementara itu, nama-nama pejabat *samgēt* dari Prasasti Cempaga C dan Tumbu, yaitu Praṇa, Wadana, Singaraja, dan Kilangö, semuanya berbeda jika dibandingkan dengan Prasasti Satra.

Penyebutan kelompok pemuka agama dalam prasasti-prasasti yang dikeluarkan di masa Jayaśakti dan Bhaṭāra Śrī Mahāguru biasanya diawali dengan penyebutan “*sireng/sira ring kaśewan/kaśaiwan*” dan “*sireng/sira ring kasogatan*”, yang berarti ‘beliau yang berasal dari kelompok (agama) Śiwa’ dan ‘beliau yang berasal dari kelompok (agama) Buddha’. Selain itu, pada masa Jayaśakti, penyebutan pemuka agama Śiwa umumnya bergelar *ḍang ācārya*, lalu dilanjutkan dengan pemuka agama Buddha yang umumnya bergelar *ḍang upādhyāya*, kecuali dalam penyebutan di Prasasti Manikliu E. Penyebutan di Prasasti Manikliu E tidak diawali dengan “*sireng kaśewan*” sebelum menyebutkan para pemuka agama Śiwa, dan hanya menyebutkan “*sireng kasogatan*” sebelum menyebutkan para pemuka agama Buddha. Selain itu, gelar *ḍang ācārya* dan *ḍang upādhyāya* dipakai sekaligus secara bersamaan, baik untuk pemuka agama Śiwa maupun Buddha, bahkan para pejabat *senapati* pun menggunakan gelar *ḍang ācārya* dan *ḍang upādhyāya*. Dalam penelitian ini, Prasasti Manikliu E tidak digunakan sebagai bahan perbandingan. Dalam catatannya, Goris (1954, 47) berpendapat bahwa bahasa dan pengejaan dalam Prasasti Manikliu E menunjukkan bahwa prasasti ini merupakan prasasti *tinulad*, dan proses penyalinannya pun banyak melewatkan beberapa aturan, terdapat kesalahan susunan, serta banyak melakukan kesalahan penggunaan istilah, sehingga sulit untuk dijadikan sebagai rujukan perbandingan.

Setelah penyebutan *ḍang ācārya* dan *ḍang upādhyāya*, biasanya terdapat penyebutan jabatan *samgat juru wadwa* di akhir penyebutan para pemuka agama Śiwa, dan *samgat mangirengiren wandami* di akhir penyebutan para pemuka agama Buddha (Hardiati 2010,

348–51). Pola berbeda tampak dalam Prasasti Cempaga C dan Tumbu yang dikeluarkan oleh Bhaṭāra Śrī Mahāguru, khususnya gelar untuk pemuka agama Śiwa. Pada masa Jayaśakti, biasanya gelar untuk pemuka agama Śiwa adalah *ḍang ācārya*, sedangkan gelar para pemuka agama Śiwa pada masa Bhaṭāra Śrī Mahāguru adalah *padukā rajāguru*, *padukā rajadyakṣa*, *rajāmanggalā*, dan *siwaratnā*. Selain itu, nama gelar tersebut tidak diikuti dengan nama pejabatnya. Namun untuk pemuka agama Buddha, gelar yang dipakai tetap *ḍang upādhyāya*, dan tetap diikuti dengan nama pejabatnya. Jabatan *samgat juru wadwa* dan *samgat mangirengiren wandami* tidak disebutkan dalam prasasti masa Bhaṭāra Śrī Mahāguru (Callenfels 1926; Sunarya 2014).

Penyebutan pemuka kelompok agama di Prasasti Satra memiliki pola yang berbeda jika dibandingkan dengan prasasti-prasasti dari masa Jayaśakti dan Bhaṭāra Śrī Mahāguru. Kelompok agama yang disebutkan dalam Prasasti Satra terdapat dalam kutipan sebagai berikut: “...(puṅku) *ḍarmadyakṣa bhatarā kusumadanta*, *mpuṅkwi kanyabawana ḍaṇacaryya dawansa*, *mpuṅkwi makarun ḍaṇacaryya sawida*, *sireṅ kasogatan pu suda*, *saṅ maha ḍaṇupadyaya saṅ nuṣa*, *mpuṅkwi kutrihaṇar ḍaṇupadyaya hajitābhawa...*”. Terjemahan kutipan tersebut adalah sebagai berikut: “...(puṅku) *ḍarmadyakṣa* (di) *Bhatarā Kusumadanta*, *mpuṅku* di *Kanyabawana* (yang bernama) *Dang Acaryya Dawangsa*, *mpuṅku* di *Makarun* (yang bernama) *Dang Acaryya Sawida*, beliau dari *kasogatan* (kelompok agama Buddha) *Pu Suda*, *Sang Maha Dang Upadyaya* (yang bernama) *Sang Nguṣa*, *mpuṅku* di *Kutrihaṇar* (yang bernama) *Dang Upadyaya Hajitābhawa...*”.

Dalam kutipan tersebut, penyebutan para pemuka agama Śiwa tidak didahului dengan penyebutan *sireng kaṣewan*, tetapi penyebutan para pemuka agama Buddha tetap didahului dengan penyebutan *sireng kasogatan*. Kemudian, tidak terdapat juga penyebutan *samgat juru wadwa* dan *samgat mangirengiren*

wandami di akhir penyebutan para pemuka agama Śiwa dan Buddha. Perbedaan lain adalah anggota dari kelompok agama Buddha yang bernama *Pu Suda* tidak menggunakan gelar keagamaan, dan adanya gelar *Sang Maha Dang Upadyaya* yang dipakai oleh *Sang Nguṣa*. Gelar *Sang Maha Dang Upadyaya* ini tidak lazim dipakai di dalam penulisan gelar keagamaan pada masa Jayaśakti dan Bhaṭāra Śrī Mahāguru. Sebagai perbandingan, kutipan dari Prasasti Buwahan C dapat menjadi contoh penyebutan yang umum terdapat dalam prasasti-prasasti masa Jayaśakti, yaitu: “...*sireṅ kasaiwan mpuṅkwiṅ dharmahāṇar ḍaṇacaryya jayabhama*, *mpuṅkwiṅ lokeswara ḍaṇacaryya abhirupa*,..., *samgat juru wadwā ḍaṇacaryya agoreśwara*, *sireṅ kasogatan mpuṅkwiṅ kuṭihāṇar ḍaṇupadyaya lakokēn*,..., *samgat maṇireṇiren wandami saṅkaryya/’*” (Callenfels 1926, 35). Adapun, kutipan dari Prasasti Tumbu dapat menjadi contoh dari penyebutan yang terdapat di masa Bhaṭāra Śrī Mahāguru, yaitu: “...*sireṅ kasaiwan*, *mpuṅkwiṅ ḍarmmaṇar*, *apasēṅgahan padukā rajāguru*, *mpuṅkwiṅ air gājah*, *apasēṅgahan padukā rajadyakṣa*, *mpuṅkwiṅ dewasthanā*, *apasēṅgahan rajāmaṅgalā*, *mpuṅkwiṅ istrinarajā*, *apasēṅgahan siwaratnā*, *sireṅ kasogatan*, *mpuṅkwiṅ barānasi*, *ḍaṇupādyaya kartajā*, *mpuṅkwiṅ pūrwwānagarā*, *ḍaṇupādyaya karmaṅga...*” (Sunarya 2014, 38–39).

Prasasti Satra juga menyebutkan adanya istilah *ḍarmadyakṣa* yang tidak lazim digunakan di prasasti Bali Kuno. Dalam konteks Prasasti Satra, istilah *ḍarmadyakṣa* yang terdapat dalam kutipan: “(puṅku) *ḍarmadyakṣa bhatarā kusumadanta*” diduga berfungsi sebagai pemuka agama yang ikut hadir dan mungkin sebagai pengawas yang bertanggung jawab terhadap bangunan suci *Kusumadanta*, tetapi tidak melaksanakan tugas hariannya di sana. Alasannya dapat ditinjau dari kutipan sebagai berikut: “...(puṅku) *ḍarmadyakṣa bhatarā kusumadanta*, *mpuṅkwi kanyabawana ḍaṇacaryya dawansa*, *mpuṅkwi makarun ḍaṇacaryya sawida...mpuṅkwi kutrihaṇar*

danupadyaya hajitābhawa". Penyebutan "*mpuṅkwi kanyabawana*", "*mpuṅkwi makarun*", dan "*mpuṅkwi kutrihañar*" secara harfiah dapat ditafsirkan '*mpungku di kanyabawana*', '*mpungku di makarun*', dan '*mpungku di kutrihañar*', karena kata *mpungkwi* merupakan bentuk singkat dari frasa *mpungku i (mpungku di)*, sehingga Kanyabawana, Makarun, dan Kutrihañar dapat ditafsirkan sebagai suatu wilayah/lokasi/tempat. Oleh karena itu, *Ḍang Ācārya Dawangsa* adalah pemuka agama Śiwa yang bertugas di wilayah Kanyabawana, *Ḍang Ācārya Sawida* adalah pemuka agama Śiwa yang bertugas di wilayah Makarun, dan *Ḍang Upadyaya Hajitābhawa* adalah pemuka agama Buddha yang bertugas di wilayah Kutrihañar. Selain itu, kata *ḍarmadyakṣa* atau *dharmādhyakṣa* berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya 'pengawas di bidang hukum', 'pejabat di bidang hukum' (Monier-Williams 1899, s.vv. "1.dharma," "dharmādhyakṣa"), yang kemungkinannya terkait dengan hukum agama. Sementara itu, Zoetmulder (1982, s.v. "dharmādhyakṣa") menafsirkannya sebagai 'pengawas atau pengelola hukum agama'. Secara etimologi, kata *dharmādhyakṣa* sendiri tidak merujuk kepada salah satu kelompok agama tertentu. Oleh karena itu, *Ḍang Ācārya Dawangsa*, *Ḍang Ācārya Sawida*, dan *Ḍang Upadyaya Hajitābhawa* adalah pengawas yang bertanggung jawab terhadap bangunan suci Bhatara Kusumadanta, tetapi tugas hariannya tidak dilaksanakan di bangunan suci tersebut karena mereka sudah memiliki wilayah kedudukannya masing-masing, yaitu di Kanyabawana, Makarun, dan Kutrihañar (lihat Astra 2002, 131–32). Selain *Ḍang Ācārya Dawangsa*, *Ḍang Ācārya Sawida*, dan *Ḍang Upadyaya Hajitābhawa*, terdapat juga penyebutan dua pemuka agama lain yang bernama Pu Suda dan *Sang Maha Ḍang Upadyaya* yang bernama Sang Nguṣa. Kedua pemuka agama tersebut berasal dari kelompok agama Buddha karena terdapat penyebutan *sireng kasogatan* atau 'beliau dari kelompok agama Buddha' sebelum penyebutan namanya.

Penyebutan kedua pemuka agama tersebut tidak menggunakan istilah *mpungkwi*, sehingga tidak diketahui apakah keduanya memiliki wilayah kedudukannya sendiri atau tidak.

Dalam catatannya, Atmodjo (1995, 105) menafsirkan *bhatara kusumadanta* sebagai tokoh dewa (*bhatara*) yang dipuja di bangunan suci Kusumadanta. Bangunan suci Kusumadanta diduga sebagai bangunan suci yang beraliran agama Śiwa. Hal ini dapat ditinjau sebagai berikut. Kata "danta" dalam bahasa Sanskerta berarti 'gading gajah' (Monier-Williams 1899, s.v. "danta"; lihat juga Zoetmulder 1982, s.v. "danta"). Selain itu, kata "kusuma" juga memiliki makna yang sama dengan "puspa", yaitu 'bunga', sehingga mungkin saja Kusumadanta memiliki keterkaitan dengan Puṣpadanta (Zoetmulder 1982, s.v. "puspa," "kusuma"). Dalam kosmologi Hindu, Puṣpadanta merupakan salah satu nama yang termasuk ke dalam Diggaja, yaitu delapan gajah yang mendampingi dewa-dewa Dikpālaka yang ikut bertugas memberikan perlindungan di delapan arah mata angin. Puṣpadanta merupakan gajah yang bertugas mendampingi Dewa Wayu/Bayu (Vāyu) yang menguasai arah barat laut (Liebert 1976, s.v. "Puṣpadanta," "diggaja," "dikpāla(ka)"; lihat juga Dowson 1913, s.v. "pushpa-danta", "dig-gajas", "loka-pālas"). Selain dalam Prasasti Satra, beberapa prasasti lain juga terdapat penyebutan Kusumadanta dan Puṣpadanta, di antaranya adalah Prasasti Tampakgangsul, Tejakula, dan Dausa BII (Poeger 1964; Ginarsa 1968). Oleh karena itu, meskipun bangunan suci Kusumadanta diperkirakan sebagai bangunan suci yang beraliran agama Śiwa, pengawas yang bertanggung jawab terhadapnya tidak harus berasal dari para pemuka agama Śiwa, tetapi bisa juga berasal dari pemuka agama Buddha.

Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, penggunaan istilah *ḍarmadyakṣa* ini tidak lazim digunakan di dalam prasasti Bali Kuno, terutama yang dikeluarkan pada masa Jayaśakti dan Bhaṭāra Śrī Mahāguru (lihat Poeger 1964; Callenfels 1926; Sunarya

2014). Penggunaan istilah *ḍarmadyakṣa* atau *dharmādhyakṣa* sebagai jabatan pemuka agama lebih banyak ditemui dalam prasasti-prasasti Jawa Kuno. Pemakaian gelar tersebut setidaknya sudah ada sejak masa Kerajaan Singhasari dan termasuk ke dalam kelompok *para taṇḍa rakryan riṅ pakirakirān* (Sedyawati 1985, 328), seperti yang terlihat dalam kutipan Prasasti Sarwadharmā yang berangka tahun 1191 Śaka (OJO LXXIX) sebagai berikut: “... *umingsor i parataṇḍa rakryan ri pakirakiran makabehan rekryan apatiḥ makasikasir kbo arēma, ..., makādi sang mantri wāgmimaya, paranitijña nūṣāntaramadhuranāthānukulak āraṇa, mapasēnggahan, ..., tan kawuntat sang pamgati tirwandang ācāryya dharmmadewa, ..., sang pamgēt ing pañjang jīwa dang ācāryya graja, mpungku dharmmadhyakṣa ri kaṣewan dang ācāryya siwanātha, mapañji tanutama, i pingsornyaññā śrī mahārāja...*” (Brandes 1913, 189). Pada masa Kerajaan Singhasari, penyebutan jabatan *dharmādhyakṣa* ini hanya merujuk pada satu nama jabatan saja, yaitu *mpungku dharmādhyakṣa ri kaṣewan*, tanpa menyebut yang lainnya, misalnya *ri kasogatan*. Namun, hal tersebut bukan berarti menutup kemungkinan bahwa jabatan *dharmādhyakṣa* juga ikut mengurus agama Buddha (Rahardjo 2011, 150, 458). Kemungkinan tersebut tersirat di dalam isi Prasasti Wurare yang ditatah pada lapik arca Mahākṣobhya yang berangka tahun 1211 Śaka. Pada bait ke-18 dan 19 dari prasasti tersebut, terdapat penyebutan *dharmādhyakṣa* yang bernama Nada, serta bait ke-1 menyiratkan bahwa dirinya adalah seorang penganut Tathāgata (Buddha) (Poerbatjaraka 1922). Keterangan yang lebih jelas mengenai pembagian urusan keagamaan oleh pejabat *dharmādhyakṣa* ini muncul pada masa kemudian, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, di antaranya adalah seperti yang ditunjukkan dalam Prasasti Tuhañaru/Sidoteko (OJO LXXXIII) yang berangka tahun 1245 Śaka dan dikeluarkan oleh Śrī Sundarapāṇḍyadewādhīśwara serta Prasasti Singosari VIII/Gajah Mada B (OJO

LXXXV) yang dikeluarkan oleh Dyah Hayām Wuruk, tetapi tidak berangka tahun. Kedua prasasti tersebut menyebutkan adanya jabatan *dharmādhyakṣa ring kaṣaiwan* dan *dharmādhyakṣa ring kasogatan* (Brandes 1913, 200, 209). Kakawin Nāgarakērtāgama pupuh 10 dan 12 menyebutkan juga adanya pejabat *dharmādhyakṣa* yang bertugas sebagai pengawas agama Śiwa dan Buddha, yang disebut dengan istilah *ḍarmmādyakṣa kaṣaiwan* dan *ḍarmmādyakṣa kaboddān* (Pigeaud 1960, I:9-10; 1962, IV:21-25). Berdasarkan uraian tersebut, penggunaan istilah *dharmādhyakṣa* dalam konteks kerajaan-kerajaan Jawa Kuno sebagai nama jabatan pemuka agama Śiwa dan Buddha, setidaknya muncul pada abad ke-13 Masehi, yaitu pada masa Kerajaan Singhasari, dan penggunaan yang lebih lazim pada masa Kerajaan Majapahit.

Prasasti Satra dalam Konteks Sejarah

Berdasarkan uraian sebelumnya, anakronisme dalam Prasasti Satra dapat ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut. Ketidakkonsistenan antara penyebutan angka tahun dan nama raja yang disebutkan, yaitu tahun 1246 Śaka dan Raja Jayaśakti. Tahun tersebut merupakan masa pemerintahan Bhaṭāra Śrī Mahāguru. Ketidakkcocokan terdapat juga dalam penyebutan pejabat yang terdapat di dalam kelompok *pakirakiran i jro makabehan*, yang terdiri dari kelompok *senapati*, *samgat*, dan pemuka agama. Pada jabatan *senapati*, nama-nama orang dari para pejabat *senapati* banyak ditemui ketidakcocokan jika dibandingkan dengan masa Jayaśakti dan Bhaṭāra Śrī Mahāguru. Jabatan *samgat* juga terlihat banyak ketidakcocokan, jika tidak ingin disebut sebagai kesalahan, dengan masa pemerintahan Jayaśakti dan Bhaṭāra Śrī Mahāguru. Dari sisi nama-nama orang yang menjabat *samgat*, justru terdapat nama pejabat, yaitu “Madatambrireh”, yang banyak disebut pada prasasti-prasasti masa Jayapangus. Nama tersebut memang muncul dalam Prasasti Tampakgangsul, tetapi penempatan kronologi Prasasti Tampakgangsul

masih belum jelas sehingga sulit untuk dijadikan perbandingan. Ketidakkonsistenan juga terlihat pada penyebutan kelompok agama, yaitu tidak adanya penyebutan *sireng kašewan/kašaiwan* sebelum menyebutkan para anggota pemuka agama Śiwa. Pola demikian tidak lazim terdapat di dalam prasasti masa pemerintahan Jayaśakti dan Bhaṭāra Śrī Mahāguru. Selain itu dalam kelompok pemuka agama Buddha, terdapat nama yang tidak menggunakan gelar keagamaan, yaitu Pu Suda. Terdapat juga penyebutan gelar keagamaan dari pemuka agama Buddha yang tidak lazim, yaitu *Sang Maha Dang Upadyaya*. Berbagai ketidakkonsistenan ini mengesankan bahwa penulisan Prasasti Satra mencampurkan unsur-unsur dari beberapa masa pemerintahan raja-raja Bali kuno, seperti dari Raja Jayaśakti, Ragajaya, dan Jayapangus. Selain dari ketidakkonsistenan dari kelompok pejabat, kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penulisan istilah atau kata juga menunjukkan bahwa Prasasti Satra merupakan prasasti *tinulad*. Hal lain yang menguatkan bahwa prasasti ini merupakan prasasti *tinulad*, yang kemungkinan dari masa yang jauh kemudian, adalah gaya aksara yang tidak mirip dan cara penulisan yang tidak rapi, serta tatahan yang tidak dalam jika dibandingkan dengan beberapa prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Jayaśakti dan Bhaṭāra Śrī Mahāguru.

Aspek lain yang cukup terlihat dalam meninjau anakronisme Prasasti Satra adalah adanya penyebutan istilah *ḍarmadyakṣa* yang juga tidak lazim terdapat pada prasasti Bali kuno. Penggunaan istilah *dharmādhyakṣa* sebagai jabatan pemuka agama terdapat juga di Jawa yang terlihat pada masa Kerajaan Singhasari di abad ke-13 Masehi, dan menjadi lebih lazim dipakai pada masa Kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahan Kṛtanegara, Kerajaan Singhasari pernah melakukan ekspansi ke Bali, yaitu pada tahun 1206 Śaka, berdasarkan keterangan yang terdapat di dalam Kakawin Nāgarakērtāgama, pupuh 42, bait 1, yang berbunyi “*rīn=āṅgawīyanarkka śāka sira motusan kana ri bāli cūrṇitan*”, dengan

terjemahan: ‘pada (tahun) Śaka *āṅga-wiyat-arka* (bagian tubuh-langit-matahari/6-0-12 atau 1206 Śaka) beliau (Kṛtanegara) mengirim utusan ke Bali untuk ditaklukkan’ (Pigeaud 1960, I:32, III:48; cf. Noorduyn 1993, 308, 312–16; Monier-Williams 1899, s.v. “*śad-āṅga*”). Prasasti Bali terakhir yang dikeluarkan sebelum tahun 1206 Śaka adalah Prasasti Bulian B yang dikeluarkan oleh Raja Adidewalañcana yang berangkat tahun 1182 Śaka. Raja ini hanya mengeluarkan sebuah prasasti saja (Goris 1954, 41). Prasasti berikutnya setelah Raja Adidewalañcana adalah Prasasti Pengotan E yang berangkat tahun 1218 Śaka yang dikeluarkan oleh Rājapatih Kbo Parud (Suhadi 1979, 167–68). Tokoh ini berkedudukan sebagai *rajāpatih*, bukan sebagai raja, sehingga diduga ada keterkaitan dengan isi Kakawin Nāgarakērtāgama tentang ekspansi Kṛtanegara ke Bali. Kedudukannya sebagai *rajāpatih* ditafsirkan sebagai raja bawahan yang ditunjuk untuk memerintah wilayah Bali setelah Bali dikuasai oleh Kṛtanegara (Astra 1997, 80). Rājapatih Kbo Parud sendiri mengeluarkan tiga buah prasasti selama pemerintahannya, yaitu Prasasti Pengotan E, Prasasti Sukawana D, dan Prasasti Kintamani E. Prasasti Sukawana D berangkat tahun 1222 Śaka, sedangkan Prasasti Kintamani E tidak berangkat tahun, tetapi hanya menyebutkan nama Rājapatih Kbo Parud saja (Suhadi 1979; Suarbhawa et al. 2013; Sunarya et al. 2015).

Setelah Prasasti Sukawana D, prasasti yang dikeluarkan pada masa berikutnya adalah Prasasti Cempaga C dan Srokadan B yang berangkat tahun 1246 Śaka yang dikeluarkan oleh Bhaṭāra Śrī Mahāguru (Goris 1954, 42–43). Pada tahun tersebut, masa pemerintahan Kerajaan Singhasari telah digantikan oleh Kerajaan Majapahit. Masa pemerintahan Kerajaan Singhasari selesai dengan adanya serangan dari Jayakatwang yang menyebabkan terbunuhnya Raja Kṛtanegara pada tahun 1214 Śaka/1292 Masehi. Pada saat Jayakatwang berkuasa, pasukan Kubilai Khan menyerang Jawa. Raden Wijaya kemudian memanfaatkan

peluang ini untuk menggulingkan kekuasaan Jayakatwang. Singkat cerita, Raden Wijaya berhasil menggulingkan kekuasaan Jayakatwang, kemudian mengusir pasukan Kubilai Khan dari tanah Jawa. Setelah itu, Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja Majapahit pada tahun 1215 Śaka/1293 Masehi (Hardiati 2010, 445–53). Hal ini dapat diasumsikan bahwa ketika Bhaṭāra Śrī Mahāguru berkuasa, kekuasaan Singhasari terhadap Bali sudah selesai, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa pengaruh unurnya masih tetap ada, misalnya masih digunakannya istilah “*makākasir/hakasirkasir*” dan “*apasənggahan*” (Suhadi 1979; Callenfels 1926; Sunarya 2014).

Kembali kepada penggunaan istilah *dharmādhyakṣa* sebagai jabatan pemuka agama, terlihat bahwa istilah tersebut tidak digunakan oleh Rājapatih Kbo Parud ketika menduduki Bali, dan tidak digunakan juga oleh Bhaṭāra Śrī Mahāguru ketika menggantikan kekuasaan Rājapatih Kbo Parud. Istilah ini tidak digunakan juga oleh raja-raja yang menggantikan Bhaṭāra Śrī Mahāguru, seperti Pāduka Bhaṭāra Śrī Wālayajakrtaningrāt bersama dengan Pāduka Ṭāra Śrī Mahāguru (Prasasti Selumbang, 1250 Śaka) dan Pāduka Bhaṭāra Śrī Aṣṭasuratnabhumbantēn (Prasasti Langgahan, 1259 Śaka) (Suhadi 1979, 187,192). Hingga saat ini, Raja Aṣṭasuratnabhumbantēn dianggap sebagai raja terakhir sebelum Bali ditaklukkan oleh Kerajaan Majapahit. Berdasarkan keterangan dari Kakawin Nāgarakērtāgama pupuh 49 bait 4: “*riṅ sākabdeṣu māśākṣi nabhbhī, ikaṅ bāli nāthanya duṣṣila nīcchā, dinon iṅ bala bhraṣṭa sakweḥ nāśa, aṛs sālwir i duṣṭa maṅdoḥ wiśathṭa*”, yang artinya: ‘pada (tahun) Śaka *iṣu-māsa-akṣi-nābhi* (panah-musim-mata-pusar/5-6-2-1 atau 1265 Śaka), Raja Bali (yang) jahat (dan) tercela, diserang oleh pasukan, kalah, seluruhnya dihancurkan, merasa takut setiap orang jahat (dan) segera menjauh’. Kutipan ini kemudian ditafsirkan sebagai ekspansi Kerajaan Majapahit ke Bali pada tahun 1265 Śaka/1343 Masehi (Pigeaud

1960, I:36, III:54; cf. Noorduyn 1993, 312–16).

Beberapa prasasti tetap terbit setelah terjadi penaklukan Majapahit terhadap Bali, seperti Prasasti Batur Pura Abang (1306 Śaka/1384 Masehi), Gobleg Pura Batur C (1320 Śaka/1398 Masehi), dan Pura Penataran Besakih (1366 Śaka/1444 Masehi dan 1380 Śaka/1458 Masehi) (Suhadi 1979, 197–204). Dalam prasasti-prasasti tersebut, istilah *dharmādhyakṣa* tidak ditemui juga penyebutannya, bahkan dalam Prasasti Pura Penataran Besakih yang berangka tahun 1366 Śaka dan 1380 Śaka (1444 Masehi dan 1458 Masehi). Oleh karena itu, timbul dugaan bahwa istilah *dharmādhyakṣa* ini kemungkinan baru terpakai setelah pertengahan abad ke-15 Masehi. Meskipun angka tahun yang tercantum di Prasasti Satra adalah 1246 Śaka, tetapi beberapa indikasi menunjukkan bahwa prasasti ini berusia jauh lebih muda dari angka tahun yang tertera, bahkan jauh setelah penaklukan Majapahit terhadap Bali.

KESIMPULAN

Berdasarkan kritik teks, Prasasti Satra merupakan prasasti salinan (*tinulad*). Melalui kritik ekstern yang ditinjau dari unsur penanggalan dan paleografi, beberapa hal mengindikasikan bahwa Prasasti Satra merupakan prasasti *tinulad*, yaitu sebagai berikut. Terdapat ketidaksesuaian antara penyebutan angka tahun dan nama raja yang disebutkan, yaitu 1246 Śaka dengan nama raja yang disebutkan adalah Śri Maharaja Śri Jayaśakti. Tahun 1246 Śaka seharusnya termasuk ke dalam masa pemerintahan Bhaṭāra Śrī Mahāguru. Terdapat indikasi juga bahwa prasasti ini dikeluarkan jauh setelah angka tahun yang tercantum. Kritik teks secara paleografi, yaitu berdasarkan gaya aksara, cara penulisan, dan kedalaman tatahan, menunjukkan bahwa prasasti ini adalah prasasti *tinulad* dan bukan dari masa pemerintahan Raja Jayaśakti serta Bhaṭāra Śrī Mahāguru. Dugaan bahwa Prasasti Satra sebagai prasasti *tinulad* dikuatkan juga melalui kritik intern yang ditinjau dari penggunaan

bahasa dan polanya, yaitu (1) penyebutan jenis jabatan dan nama pejabat yang termasuk ke dalam *pakirakan i jro makabehan*, dan (2) penempatan konteks sejarah terhadap isi atau informasi yang terkandung di dalam Prasasti Satra. Berdasarkan kritik teks, terdapat indikasi bahwa Prasasti Satra ditulis setelah pertengahan abad ke-15 Masehi, jauh setelah penaklukan Majapahit terhadap Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashmore, Wendy, dan Robert J. Sharer. 2010. *Discovering Our Past: A Brief Introduction to Archaeology*. New York: McGraw-Hill.
- Astra, I Gde Semadi. 1997. "Birokrasi Pemerintahan Bali Kuno Abad XII-XIII: Sebuah Kajian Epigrafis." Disertasi, Universitas Gadjah Mada.
- . 2002. "Lembaga Pemerintahan Tingkat Pusat pada Masa Gunapriyadharmapatni-Dharmodayana Warmadewa." *Humaniora* XIV (2): 127–36.
- Atmodjo, M.M. Sukarto K. 1970. "Preliminary Report on The Copper-Plate Inscription of Asahduren." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 126 (2): 215–27. <http://www.jstor.org/stable/27861112>.
- . 1972. "The Charter of Dayankayu." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 128 (2/3): 257–80. <http://www.jstor.org/stable/27861259>.
- . 1975. *Sedikit tentang Cagar Budaya di Bali dan Permasalahannya*. Gianyar: Proyek Penyelamatan Benda-Benda Purbakala Provinsi Dati I Bali.
- . 1977. "The Charter of Kapal." *Aspek-Aspek Arkeologi Indonesia*, no. 2: 1–23.
- . 1995. "Parimandala Karaman Jiken Satra." Dalam *Proceedings Analisis Hasil Penelitian Arkeologi: Analisis Sumber Tertulis Masa Klasik*, disunting oleh Endang Sri Hardiati, 102–10. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Boechari. 2012. "Epigrafi dan Sejarah Indonesia." Dalam *Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti: Kumpulan Tulisan Boechari*, disunting oleh Ninie Susanti, Hasan Djafar, Edhie Wurtjantoro, dan Arlo Griffiths, 3–28. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Brandes, J.L.A. 1913. "Oud Javaansche Oorkonden, nagelaten transcripts van wijlen Dr. J.L.A. Brandes, uitgegeven door Dr. N.J. Krom." *Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* LX.
- Callenfels, P.V. van Stein. 1926. "Epigraphia Balica I." *Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* LXVI.
- Damais, Louis-Charles. 1975. "Preseventeenth-Century Indonesian History: Sources and Directions." Dalam *An Introduction to Indonesian Historiography*, disunting oleh Soedjatmoko, Mohammad Ali, G.J. Resink, dan G.McT. Kahin, Cet. Ke-3, 24–35. London: Cornell University Press.
- de Casparis, J.G. 1975. *Indonesian Palaeography: A History of Writing in Indonesia from The Beginnings to C. A.D. 1500*. Leiden: E.J. Brill.
- Djafar, Hasan. 1991. "Prasasti dan Historiografi." Dalam *Proceedings Seminar Sejarah Nasional IV: Subtema Historiografi*, 177–216. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Dowson, John. 1913. *A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, Geography, History, and Literature*. Fifth Edit. London: Kegan Paul, Trench, Trübner & Co.,Ltd.
- Ginarsa, Ktut. 1968. *Prasasti Baru Radja Ragajaya*. Singaradja: Direktorat Bahasa dan Kesusastraan.
- Goris, Roelof. 1954. *Prasasti Bali*. 2 Vols. Bandung: N.V. Masa Baru.
- . 1965. *Ancient History of Bali*. Denpasar: Udayana University.
- Hardiati, Endang Sri. 2010. "Zaman Kuno." Jilid II dari *Sejarah Nasional Indonesia (Edisi Pemutakhiran)*, disunting oleh R.P. Soejono dan R.Z. Leirissa, Cet. Ke-4. Jakarta: Balai Pustaka.

- Kartakusuma, Richadiana. 2003. "Peran dan Fungsi Epigrafis sebagai Bidang Studi Sumber Tertulis dan Permasalahannya." Dalam *Cakrawala Arkeologi: Persembahan untuk Prof. Dr. Mundardjito*, disunting oleh R. Cecep Eka Permana, Wannu Rahardjo, dan Chaksana A.H. Said, 199–217. Depok: Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.
- Liebert, Gösta. 1976. *Iconographic Dictionary of The Indian Religions: Hinduism-Buddhism-Jainism*. Leiden: E.J. Brill.
- Monier-Williams, Monier. 1899. *A Sanskrit-English Dictionary*. Oxford: Oxford University Press.
- Noorduyn, J. 1993. "Some Remarks on Javanese Chronogram Words: A Case of Localization." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 149 (2): 298–317.
- Pigeaud, Theodore G. Th. 1960. *Java in The 14Th Century: A Study in Cultural History*. Volume I: Javanese Texts in Transcription. The Hague: Martinus Nijhoff.
- . 1962. *Java in The 14Th Century: A Study in Cultural History*. Volume IV: Commentaries and Recapitulation. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Poeger, Nyoman. 1964. "Radja Jayaśakti di Bali." Skripsi, Fakultas Sastra, Universitas Udayana.
- Poerbatjaraka, R.Ng. 1922. "De Inscriptie Van Het Mahaksobhya- Beeld Te Simpang (Soerabaya)." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 78 (1): 426 – 462. doi:10.1163/22134379-90001594.
- Rahardjo, Supratikno. 2011. *Peradaban Jawa: Dari Mataram Kuno sampai Majapahit Akhir*. Cetakan Kedua. Depok: Komunitas Bambu.
- Renfrew, Colin, dan Paul Bahn. 2016. *Archaeology: Theories, Methods, and Practice*. 7th ed. London: Thames & Hudson Ltd.
- Sedyawati, Edi. 1985. "Pengarcaan Gaṇeśa Masa Kaḍiri dan Siṅhasāri: Sebuah Tinjauan Sejarah Kesenian." Disertasi, Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.
- Soesanti, Ninie. 1997. "Analisis Prasasti." Dalam *Pertemuan Ilmiah Arkeologi VII Jilid 1*, disunting oleh Endang Sri Hardiati, 171–82. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Suarbhawa, I Gusti Made. 2004a. "Prospek Penelitian Epigrafi di Wilayah Kerja Balai Arkeologi Denpasar." *Forum Arkeologi* 17 (1): 61–74.
- . 2004b. "Tiga Lempeng Prasasti Tembaga dari Banjar Langkan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli." *Berita Penelitian Arkeologi* (Balai Arkeologi Denpasar), 41–63.
- Suarbhawa, I Gusti Made, I Nyoman Sunarya, Hedwi Prihatmoko, dan Luh Suwita Utami. 2016. "Penelitian Prasasti di Pura Bale Agung Satra, Desa Satra, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli." Laporan Penelitian Arkeologi, Balai Arkeologi Bali, Denpasar.
- Suarbhawa, I Gusti Made, I Nyoman Sunarya, I Wayan Sumerata, dan Luh Suwita Utami. 2013. "Prasasti Sukawana." *Berita Penelitian Arkeologi* (Balai Arkeologi Denpasar), 1–35.
- Suhadi, Machi. 1979. *Himpunan Prasasti Bali Koleksi R. Goris dan Ktut Ginarsa*. Jakarta: Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional.
- Sunarya, I Nyoman. 2014. "Prasasti Raja Sri Maharaja Sri Bhatara Mahaguru Dharmmotungga Warmmadewa di Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali." *Forum Arkeologi* 27 (1): 33–44. doi:http://dx.doi.org/10.24832/fa.v27i1.56.
- Sunarya, I Nyoman, I Gusti Made Suarbhawa, dan I Wayan Sumerata. 2015. "Prasasti Kintamani." *Berita Penelitian Arkeologi* (Balai Arkeologi Denpasar), 1–37.
- Wiguna, I Gusti Ngurah Tara. 2011. "Menelusuri Asal Mula Aksara Bali: Suatu Kajian Paleografi." Dalam *Mutiara Warisan Budaya: Sebuah Bunga Rampai Arkeologis Persembahan untuk Prof. Dr. I Gde Semadi Astra*, disunting oleh I Nyoman Wardi dan I Wayan Srijaya, 9–27. Denpasar: Pelawa Sari.
- Zoetmulder, P.J. 1982. *Old Javanese-English Dictionary*. 2 Vols. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.